

ABSTRAK
**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI ANGGOTA KPU DAN BADAN
ADHOC (SIKBA) DALAM PENERIMAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

RIVALDO ASAD AKBAR

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggota KPU dan badan Ad Hoc, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIKBA). Hasil pengamatan pra-riset menunjukkan masih adanya pelanggaran kode etik oleh anggota badan Ad Hoc dan kesulitan dalam pengarsipan data. Selain itu, belum adanya satu database terpadu juga menjadi permasalahan yang terjadi. Penelitian ini mengkaji implementasi SIKBA dalam penerimaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di KPU Kota Bandar Lampung dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi SIKBA masih menghadapi tantangan dalam keempat aspek teori Edward III. Komunikasi terkait sosialisasi aplikasi masih belum optimal. Sumber daya, baik manusia maupun teknologi, belum sepenuhnya memadai. Disposisi implementor menunjukkan komitmen positif namun terhambat kendala teknis. Struktur birokrasi dalam pengelolaan aplikasi masih memerlukan penyesuaian. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pelatihan komprehensif, serta masalah teknis seperti error sistem. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan intensif, perbaikan sistem pengarsipan digital, serta evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap aplikasi SIKBA.

Kata Kunci: SIKBA, implementasi kebijakan, Edward III, KPU, Panitia Pemilihan Kecamatan

ABSTRACT

Implementation of the Information System Application for KPU Members and Ad Hoc Bodies (SIKBA) in the Recruitment of District Election Committees (PPK) at the General Election Commission of Bandar Lampung City

By:

RIVALDO ASAD AKBAR

In an effort to enhance efficiency and transparency in managing KPU members and Ad Hoc bodies, the General Election Commission (KPU) has implemented the Information System for KPU Members and Ad Hoc Bodies (SIKBA). Pre-research observations indicate persistent code of ethics violations by Ad Hoc body members and difficulties in data archiving. Furthermore, the absence of an integrated database remains an ongoing issue. This study examines the implementation of SIKBA in the recruitment of Sub-district Election Committees (PPK) at the KPU of Bandar Lampung City using Edward III's policy implementation theory, which comprises communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research method employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The results reveal that SIKBA's implementation still faces challenges in all four aspects of Edward III's theory. Communication regarding application socialization remains suboptimal. Resources, both human and technological, are not yet fully adequate. Implementer disposition shows positive commitment but is hindered by technical constraints. The bureaucratic structure in application management still requires adjustment. Major inhibiting factors include limitations in technological infrastructure, lack of comprehensive training, and technical issues such as system errors. This study recommends improvements in technological infrastructure, intensive training, enhancement of digital archiving systems, as well as continuous evaluation and refinement of the SIKBA application.

Keywords: *SIKBA, policy implementation, Edward III, KPU, Sub-district Election Committee*